

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2025



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ASAHAN**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - SENTANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kisaran 30 Januari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Asahan

Ali Muqhorat, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197308062002121004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	2
D. Landasan Hukum	3
E. Sistematika	4
BAB II. PERENCANAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	9
C. Perjanjian Kinerja tahun 2025	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	25
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
BAB IV. PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan	7
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan	8
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan	9
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025	10
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025	10
Tabel 2.6. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025	14
Tabel 2.7. Perubahan Pogram dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025	14
Tabel 3.1. Pengkategorian Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan tahun 2025	21
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja	22
Tabel 3.4. Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	22
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	23
Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	24
Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	25
Tabel 3.8. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	25
Tabel 3.9. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaranku	29
Tabel 3.10. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Aggaran Program dan Kegiatan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi 2

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025
- Lampiran 2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025
- Lampiran 3. TABEL REALISASI KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025
- Lampiran 4. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025
- Lampiran 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025
- Lampiran 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025
- Lampiran 7. PENGUKURAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran

perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 02 tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan di wilayah sentra produksi padi di Kabupaten Asahan;
2. Peningkatan diversifikasi pangan dengan standar Pola Pangan Harapan (PPH);
3. Penanganan daerah rawan pangan;
4. Stabilisasi harga dan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
5. Ketersediaan Cadangan pangan pemerintah daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan periode 2025-2029.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 2)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 10)
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 24)

7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 24)

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 adalah :

- | | | | |
|---------|---|-----------------------|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | : | PERENCANAAN KINERJA | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu. |
| BAB III | : | AKUNTABILITAS KINERJA | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | : | PENUTUP | |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Asahan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025 –2029 yaitu:

“Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan pada visi Kabupaten Asahan diatas, visi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Asahan ditetapkan sebagai berikut:

“Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga secara berkelanjutan melalui pengembangan teknologi dan penganekaragaman konsumsi pangan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat”.

Pengertian dari visi di atas adalah

a. Meningkatkan Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga Secara Berkelanjutan

Mengandung arti bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan berupaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dimulai dari tingkat Rumah Tangga dengan melakukan pembinaan pemanfaatan Sumber Daya yang ada, terutama optimalisasi pemanfaatan lahan, meningkatkan pendapatan keluarga melalui keuntungan usaha Tani berorientasi Agribisnis (UBA) yang berpihak kepada Petani.

b. Secara Berkelanjutan Melalui Pengembangan Teknologi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Mengandung arti bahwa meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan Ketahanan Pangan yang diberikan oleh Masyarakat Produktifitas tenaga kerja dan Tingkat Manajerial Masyarakat dan meningkatnya akses masyarakat pada permodalan, teknologi dan pemasaran hasil sehingga mampu meningkatkan usaha tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi Rumah Tangga Petani sekaligus mengentaskan kemiskinan.

2. Misi

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) misi yakni:

- a. Mewujudkan Ketahanan pangan yang mantap melalui pertanian yang modern dan berwawasan agribisnis.
- b. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan.
- c. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya dan budaya lokal.
- d. Mendorong berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan, dan memfasilitasi peningkatan pengelolaan manajemen kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan mengacu pada Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	115,80	116,14	116,49	116,84	117,19	117,54

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	<p>Jlh Ketersediaan Beras = Total stok beras yang tersedia (produksi beras pada kilang + cadangan beras pemerintah daerah)</p> <p>Kebutuhan Beras = Total kebutuhan konsumsi beras masyarakat dalam periode tertentu dalam satu wilayah kabupaten</p> <p>100 % : Pengali Persentase</p>	$\frac{\text{Jlh Ketersediaan Beras}}{\text{Kebutuhan Beras}} \times 100 \%$	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	115,80

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 10 bulan September tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang cukup, serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	81.409,11
		Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	Nilai	B=65

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100 %	3.777.074.175,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	39.013.150,00
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 Dok</i>	<i>12.999.000,00</i>
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>1 Dok</i>	<i>13.000.125,00</i>
3	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>4 Lap</i>	<i>13.014.025,00</i>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 lap	3.093.116.394,00
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>25 org/bln</i>	<i>3.084.770.394,00</i>
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan</i>	<i>1 Lap</i>	<i>8.346.000,00</i>

		<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 Dok	10.800.000,00
<i>1</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)</i>	<i>1 Paket</i>	<i>10.800.000,00</i>
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	8 Lap	243.853.854,00
<i>1</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>15.056.500,00</i>
<i>2</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>35.994.075,00</i>
<i>3</i>	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>10.021.479,00</i>
<i>4</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>25.560.900,00</i>
<i>5</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>15.589.900,00</i>
<i>6</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan</i>	<i>1 Dok</i>	<i>16.632.000,00</i>
<i>7</i>	<i>Penyediaan Bahan /Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>	<i>49.999.000,00</i>
<i>8</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 Lap</i>	<i>75.000.000,00</i>
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Unit)	12 Unit	61.852.100,00
<i>1</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)</i>	<i>12 Unit</i>	<i>61.852.100,00</i>
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	2 Lap	150.443.677,00
<i>1</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan</i>	<i>1 Lap</i>	<i>53.387.677,00</i>
<i>2</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i>	<i>1 Lap</i>	<i>97.056.000,00</i>
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	58 Unit	177.995.000,00

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	15 Unit	107.250.000,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bagunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.445.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	30 Unit	20.300.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skore PPH Konsumsi	89,3 %	765.084.825,00
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4 Lap	429.295.225,00
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.180 Keluarga	150.000.225,00
2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Lap	95.158.600,00
3	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Lap	52.023.125,00
4	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	51.677.875,00
5	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Lap	41.158.350,00
6	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dok	13.627.050,00
7	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	25.650.000,00
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25 Ton	175.790.000,00
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	158.190.000,00
2	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton	17.600.000,00

3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2 Lap	159.999.600,00
1	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	1 Lap	139.999.500,00
2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	1 Lap	20.000.100,00
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan desa rawan pangan	81,82 %	275.000.050,00
1	Penyusunan Peta Ketersediaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan	1 Dok	29.999.950,00
1	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 Dok	29.999.950,00
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	245.000.100,00
1	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dok	100.000.200,00
2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	1 lap	24.999.750,00
3	<i>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi</i>		1 Dok	100.000.050,00
4	<i>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	1 Dok	20.000.100,00
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	18,18	55.688.900,00
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	55.688.900,00
1	<i>Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	<i>Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	1 Lap	25.689.900,00
2	<i>Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan</i>	4 Dok	29.999.000,00

		<i>mutu pangan segar asal tumbuhan</i>		
--	--	--	--	--

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	115,80

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	65,30 (B)	3.933.455.068,40
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	47.130.200,00
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3 Dok	17.511.850,00
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2 Dok	15.118.325,00
3	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4 Lap	14.500.025,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (laporan)	2 Lap	3.152.189.406,40
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)</i>	25 Org/Bln	3.143.918.406,40

2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1 Lap	8.271.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 Dok	9.450.000,00
1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)</i>	1 Paket	9.450.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	8 Lap	242.410.645,00
1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)</i>	1 Paket	15.056.500,00
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)</i>	1 Paket	40.320.575,00
3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan (Paket)</i>	1 Paket	15.024.820,00
4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)</i>	1 Paket	25.560.900,00
5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	1 Paket	15.274.200,00
6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (dokumen)</i>	1 Dok	16.632.000,00
7	<i>Penyediaan Bahan /Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan</i>	2 Paket	34.541.650,00
8	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Lap	80.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Unit)	12 Unit	113.602.100,00
1	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)</i>	12 Unit	113.602.100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah (laporan)	2 Lap	150.443.677,00
1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)</i>	1 Laporan	53.387.677,00
2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)</i>	1 Laporan	97.056.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (unit)	46 Unit	218.229.040,00

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	15 Unit	123.544.500,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bagunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.444.540,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	30 Unit	16.240.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	51,22 %	650.000.000,00
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/KOTA	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (Unit)	4 Unit	650.000.000,00
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	4 Unit	650.000.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	87,27 %	2.896.610.325,00
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok (Beras) (Ton)	97.174,19 Ton	1.141.575.275,00
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1.180 kpm	732.054.675,00
2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1 Lap	252.031.100,00
3	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya local (Laporan)	1 Lap	44.576.425,00
4	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	4 Unit	27.952.875,00
5	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Lap	26.171.350,00
6	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dok	8.923.700,00
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis (Laporan)	1 Lap	32.168.400,00
8	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1 Dok	17.696.750,00
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Dikelola (Ton)	35 Ton	351.780.000,00

1	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)</i>	25 Ton	350.690.000,00
2	<i>Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (ton)</i>	10 Ton	1.090.000,00
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)	2 Lap	1.403.255.050,00
1	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)</i>	1 Lap	1.385.223.550,00
2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)</i>	1 Lap	18.031.500,00
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	80,88%	652.389.725,00
1	Penyusunan Peta Ketersediaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan (Dokumen)	1 Dok	21.819.950,00
1	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 Dok	21.819.950,00
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan yang Ditangani	21	630.569.775,00
1	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1 Dok	516.856.100,00
2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)</i>	1 Lap	18.730.650,00
3	<i>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>		1 Dok	84.906.275,00
4	<i>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (dokumen)</i>	1 Dok	10.076.750,00
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	90 %	52.127.618,00
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	22 Kegiatan	52.127.618,00
1	<i>Koordinasi dan inkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	<i>Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)</i>	1 Dok	32.800.168,00

2	<i>Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)</i>	1 Lap	19.327.450,00
---	--	---	-------	---------------

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

a.	Lebih dari 100	:	Sangat Baik
b.	76% sampai 100%	:	Baik (B)
c.	56% sampai 75 %	:	Cukup (C)
d.	Kurang dari 55 %	:	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pada periode Renstra 2025-2029 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Adalah Persetase Ketersediaan Pangan Utama Beras, yang mana berarti ukuran seberapa

besar ketersediaan beras dibandingkan dengan kebutuhan beras masyarakat dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Indikator ini dapat menunjukkan apakah pasokan beras cukup, kurang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	115,80	116,64	100,73 %	Sangat Baik	Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Tujuan, sasaran dan juga indikator kinerja, hasil Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Pada Tahun 2025 senilai 100,73 %, dengan demikian capaian indikator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan termasuk kategori Sangat Baik.

Berdasarkan data realisasi yang ada, bahwa total ketersediaan beras di Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak 94.914 ton dan total konsumsi beras masyarakat Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebesar 81.370 ton. Berdasarkan angka tersebut capaian persentase ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Asahan sebesar 116,64 % dengan persentase realisasi sebesar 100,73 %. Melihat hasil capaian persentase ketersediaan pangan utama pangan (beras) dapat dipastikan pada Tahun 2025 ketersediaan beras di Kabupaten Asahan mencukupi untuk konsumsi Masyarakat di Kabupaten Asahan

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024	2025		
				Baseline	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	115,45	115,80	116,64	100,73

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase ketersediaan pangan utama (beras) pada Tahun 2025 meningkat di bandingkan Tahun 2024. Capaian Persentase Ketersediaan Pangan Utama Beras pada Tahun 2024 sebesar 115,45 % dan pada Tahun 2025 sebesar 116,64 %. Peningkatan persentase ketersediaan beras di Kabupaten Asahan tidak terlepas dari program bantuan Cadangan Beras Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dan juga penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah pada Tahun 2025, yang mana pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran untuk Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebesar 25 Ton yang di simpan di Gudang Bulog Kisaran.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	116,64 %	117,19 %	99,53 %

Tabel diatas menunjukkan Tingkat kemajuan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan terhadap target akhir indikator kinerja pada Tahun 2029, dimana tahun 2025 adalah awal periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan. Tingkat kemajuan yang di peroleh pada Tahun 2025 berada pada angka 98,81 %.

Peningkatan ini di dukung oleh beberapa hal, yaitu :

1. Adanya program penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Pusat yang di laksanakan pada Tahun 2025
2. Adanya pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yang mana menambah stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
3. Kondisi panen padi petani pada Tahun 2025 cukup baik
4. Adanya serapan gabah petani oleh Bulog, sehingga hasil panen padi di Kabupaten Asahan tidak di jual keluar Kabupaten Asahan.
5. Pelaksanaan sidak ke kilang padi untuk memastikan stok beras terutama dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional
6. Adanya bantuan benih dan alsintan bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi padi di Kabupaten Asahan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 (%)	Standar Nasional (%)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	116,64	126,51%	92,19

Target Ketersediaan beras nasional diproyeksikan mencapai 126,51%. Angka ini sesuai dengan Tingkat aman/swasembada dengan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan diatas 100%. Target produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34 juta ton pada akhir 2025 dan target stok Cadangan beras pemerintah di Bulog ditingkatkan menjadi 4 juta ton pada akhir 2025. Berdasarkan angka tersebut Pemerintah optimis mencapai swasembada beras dan menghentikan impor beras umum mulai tahun 2025. Stok yang kuat ini didukung oleh peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan irigasi dan distribusi pupuk langsung ke petani.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	115,80 %	116,64 %	100,73	<p>Tercapainya target pada Tahun 2025 tidak terlepas dari peran serta hadirnya pemerintah dalam upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Asahan. Pemerintah hadir dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dengan memberikan bantuan alsintan, perbaikan irigasi dan sarana pasca panen bagi petani, sehingga hal tersebut menunjang peningkatan produksi padi di Kabupaten Asahan.</p> <p>Selain itu hadirnya pemerintah, melalui perum bulog dalam melakukan penyerapan gabah hasil panen petani juga menjadi salah satu analisis keberhasilan peningkatan produksi padi petani.</p>	

Pada Tahun 2025 target Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Utama (beras) sebesar 115,80% dengan realisasi sebesar 116,64%. Dari realisasi tersebut menghasilkan persentase capaian Indikator Kinerja sebesar 100,73%.

Keberhasilan capaian target indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan tidak terlepas dari peran serta hadirnya pemerintah dalam upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Asahan. Pemerintah hadir dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dengan memberikan bantuan alsintan, perbaikan irigasi dan sarana pasca panen bagi petani, sehingga hal tersebut menunjang peningkatan produksi padi di Kabupaten Asahan.

Selain itu hadirnya pemerintah, melalui perum bulog dalam melakukan penyerapan gabah hasil panen petani juga menjadi salahsatu analisis keberhasilan peningkatan produksi padi petani.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100,73	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	- Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100 %	Menunjang
					- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	102,7 %	Menunjang
					- Program Penanganan Kerawanan Pangan	- Jumlah Desa/Keluahan Rentan Rawan Pangan yang Ditangani	109,9 %	Menunjang
					- Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	111,11%	Menunjang

Tabel diatas menunjukkan Tingkat keberhasilan dalam menunjang keberhasilan kinerja. Program/Kegiatan pada Tahun 2025 sangat mendukung dalam keberhasilan kinerja, diantaranya dilaksanakannya pembangunan infrastruktur kemandirian pangan seperti lantai jemur dan lumbung pangan, penyaluran bantuan pangan bagi keluarga resiko stunting dan keluarga kurang mampu. Selain itu bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan beras, minyak goreng, daging ayam dan telur, juga ikut mendukung dalam pencapaian target kinerja pada Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.933.455.068,40	3.535.534.235,00	89,88
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	47.130.200,00	45.986.100,00	97,57
	1. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>17.511.850,00</i>	<i>17.310.650,00</i>	98,85
	2. <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>15.118.325,00</i>	<i>14.175.425,00</i>	93,76
	3. <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>14.500.025,00</i>	<i>14.500.025,00</i>	100,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.152.189.406,40	2.765.038.914,00	87,72
	1. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>3.143.918.406,40</i>	<i>2.756.815.914,00</i>	87,69
	2. <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>8.271.000,00</i>	<i>8.223.000,00</i>	99,42
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
	1. <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>9.450.000,00</i>	<i>9.450.000,00</i>	100,00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.410.645,00	240.853.440,00	99,36
	1. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>15.056.500,00</i>	<i>15.056.500,00</i>	100,00
	2. <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>40.320.575,00</i>	<i>40.309.075,00</i>	99,97
	3. <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>15.024.820,00</i>	<i>14.919.000,00</i>	99,30
	4. <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>25.560.900,00</i>	<i>25.560.900,00</i>	100,00
	5. <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>15.274.200,00</i>	<i>15.274.200,00</i>	100,00
	6. <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>16.632.000,00</i>	<i>16.125.000,00</i>	96,95
	7. <i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	<i>34.541.650,00</i>	<i>34.541.650,00</i>	100,00
	8. <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>80.000.000,00</i>	<i>79.067.115,00</i>	98,83
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	113.602.100,00	113.150.000,00	99,60
	1. <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>113.602.100,00</i>	<i>113.150.000,00</i>	99,60
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.443.677,00	146.841.099,00	97,61
	1. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>53.387.677,00</i>	<i>49.785.099,00</i>	93,25
	2. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>97.056.000,00</i>	<i>97.056.000,00</i>	100,00
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218.229.040,00	214.214.682,00	98,16
	1. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>123.544.500,00</i>	<i>119.772.682,00</i>	96,95
	2. <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>78.444.540,00</i>	<i>78.382.000,00</i>	99,92
	3. <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>16.240.000,00</i>	<i>16.060.000,00</i>	98,89

	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	650.000.000,00	647.962.333,00	99,69
1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	650.000.000,00	647.962.333,00	99,69
	1. <i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>650.000.000,00</i>	<i>647.962.333,00</i>	<i>99,69</i>
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.896.610.325,00	2.836.430.911,00	97,92
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.141.575.275,00	1.136.314.825,00	99,54
	1. <i>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>	<i>732.054.675,00</i>	<i>730.817.975,00</i>	<i>99,83</i>
	2. <i>Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>	<i>252.031.100,00</i>	<i>251.613.900,00</i>	<i>99,83</i>
	3. <i>Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>44.576.425,00</i>	<i>44.575.225,00</i>	<i>100,00</i>
	4. <i>Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>27.952.875,00</i>	<i>27.851.975,00</i>	<i>99,64</i>
	5. <i>Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>26.171.350,00</i>	<i>23.148.700,00</i>	<i>88,45</i>
	6. <i>Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>8.923.700,00</i>	<i>8.663.700,00</i>	<i>97,09</i>
	7. <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis</i>	<i>32.168.400,00</i>	<i>31.947.800,00</i>	<i>99,31</i>
	8. <i>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	<i>17.696.750,00</i>	<i>17.695.550,00</i>	<i>99,99</i>
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	351.780.000,00	329.451.650,00	93,65
	1. <i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>350.690.000,00</i>	<i>328.361.650,00</i>	<i>93,63</i>
	2. <i>Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>100,00</i>
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	1.403.255.050,00	1.370.664.436,00	97,68
	1. <i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>1.385.223.550,00</i>	<i>1.355.632.936,00</i>	<i>97,86</i>
	2. <i>Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun</i>	<i>18.031.500,00</i>	<i>15.031.500,00</i>	<i>83,36</i>
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	652.389.725,00	652.083.125,00	99,95
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.819.950,00	21.818.750,00	99,99
	1. <i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Keretakan Pangan</i>	<i>21.819.950,00</i>	<i>21.818.750,00</i>	<i>99,99</i>
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	630.569.775,00	630.264.375,00	99,95

	1.	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	516.856.100,00	516.565.500,00	99,94
	2.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/Kota</i>	18.730.650,00	18.728.250,00	99,99
	3.	<i>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>	84.906.275,00	84.894.475,00	99,99
	4.	<i>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	10.076.750,00	10.076.150,00	99,99
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			52.127.618,00	49.844.750,00	95,62
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		52.127.618,00	49.844.750,00	95,62
	1.	<i>Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	32.800.168,00	31.177.300,00	95,05
	2.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	19.327.450,00	18.667.450,00	96,59
Total			8.184.582.736,40	7.721.855.354,00	94,35

1. Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 8.184.582.736,40 (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam koma Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp 3.143.918.406,40
 Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.927.062.230,00
 Belanja Modal : Rp 113.602.100,00

2. Realisasi pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 7.721.855.354,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 94,35 % dari pagu Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp 2.756.815.914,00
 Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.851.889.440,00
 Belanja Modal : Rp 113.150.000,00

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	115,80	116,64	100,73	8.184.582.736,40	7.721.855.354,00	94,35	6,38%

Pada table diatas dapat dilihat anggaran yang tersedia pada Dinas Ketahanan Pangan Pada Tahun 2025 sebesar Rp 8.184.582.736,40 (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Rupiah) dan realisasi sebesar Rp 7.721.855.354,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 94,35 %. Dari persentase capaian realisasi anggaran dapat di lihat nilai efisiensi anggaran sebesar 6,38%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.933.455.068,40	3.535.534.235,00	89,88	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah				47.130.200,00	45.986.100,00	97,57	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100	17.511.850,00	17.310.650,00	98,85	1,15
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100	15.118.325,00	14.175.425,00	93,76	6,24
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	100	14.500.025,00	14.500.025,00	100,00	0,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.152.189.406,40	2.765.038.914,00	87,72	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org/Bln	25 Org/Bln	100	3.143.918.406,40	2.756.815.914,00	87,69	12,31
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100	8.271.000,00	8.223.000,00	99,42	0,58

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	0,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					242.410.645,00	240.853.440,00	99,36	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	15.056.500,00	15.056.500,00	100,00	0,00
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	40.320.575,00	40.309.075,00	99,97	0,03
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100	15.024.820,00	14.919.000,00	99,30	0,70
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100	25.560.900,00	25.560.900,00	100,00	0,00
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	15.274.200,00	15.274.200,00	100,00	0,00
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	1 Dok	100	16.632.000,00	16.125.000,00	96,95	3,05
	7.	Penyediaan Bahan/ Material	2 Paket	2 Paket	100	34.541.650,00	34.541.650,00	100,00	0,00
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100	80.000.000,00	79.067.115,00	98,83	1,17
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah					113.602.100,00	113.150.000,00	99,60	
	1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	12 Unit	100	113.602.100,00	113.150.000,00	99,60	0,40
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.443.677,00	146.841.099,00	97,61	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100	53.387.677,00	49.785.099,00	93,25	6,75
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100	97.056.000,00	97.056.000,00	100,00	0,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					218.229.040,00	214.214.682,00	98,16	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	15 Unit	100	123.544.500,00	119.772.682,00	96,95	3,05
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	78.444.540,00	78.382.000,00	99,92	0,08
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	30 Unit	100	16.240.000,00	16.060.000,00	98,89	1,11
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						650.000.000,00	647.962.333,00	99,69	
1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupate/Kota					650.000.000,00	647.962.333,00	99,69	
	1.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	4 Unit	4 Unit	100	650.000.000,00	647.962.333,00	99,69	0,31
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.896.610.325,00	2.836.430.911,00	97,92	
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.141.575.275,00	1.136.314.825,00	99,54	
	1.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.180 kpm	1.180 kpm	100	732.054.675,00	730.817.975,00	99,83	0,17
	2.	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	100	252.031.100,00	251.613.900,00	99,83	0,17
	3.	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Lap	1 Lap	100	44.576.425,00	44.575.225,00	100,00	0,00

	4.	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	100	27.952.875,00	27.851.975,00	99,64	0,36
	5.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	100	26.171.350,00	23.148.700,00	88,45	11,55
	6.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100	8.923.700,00	8.663.700,00	97,09	2,91
	7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Lap	1 Lap	100	32.168.400,00	31.947.800,00	99,31	0,69
	8.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	1 Dok	100	17.696.750,00	17.695.550,00	99,99	0,01
2.		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				351.780.000,00	329.451.650,00	93,65	
	1.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	25 Ton	100	350.690.000,00	328.361.650,00	93,63	6,37
	2.	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	10 Ton	0	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00	-100,00
3.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi				1.403.255.050,00	1.370.664.436,00	97,68	
	1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Lap	1 Lap	100	1.385.223.550,00	1.355.632.936,00	97,86	2,14
	2.	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 Lap	1 Lap	100	18.031.500,00	15.031.500,00	83,36	16,64
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				652.389.725,00	652.083.125,00	99,95	
1.		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				21.819.950,00	21.818.750,00	99,99	
	1.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dok	1 Dok	100	21.819.950,00	21.818.750,00	99,99	0,01
2.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				630.569.775,00	630.264.375,00	99,95	
	1.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100	516.856.100,00	516.565.500,00	99,94	0,06
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	100	18.730.650,00	18.728.250,00	99,99	0,01
	3.	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dok	1 Dok	100	84.906.275,00	84.894.475,00	99,99	0,01
	4.	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100	10.076.750,00	10.076.150,00	99,99	0,01
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				52.127.618,00	49.844.750,00	95,62	
1.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				52.127.618,00	49.844.750,00	95,62	
	1.	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dok	1 Dok	100	32.800.168,00	31.177.300,00	95,05	4,95
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Lap	1 Lap	100	19.327.450,00	18.667.450,00	96,59	3,41

Dari tabel perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran program dan Kegiatan diatas dapat di lihat ada beberapa sub kegiatan dengan capaian esisiensi efisien dalam penggunaan anggaran dan selebihnya kegiatan belum mencapai capaian esisiensi efisien dalam penggunaan anggaran. Hal tersebut terjadi karena ada selisih harga dalam belanja barang kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :


- Tujuan Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan
- Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau
- Indikator kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dengan target 115,80% dengan capaian realisasi sebesar 116,64% dan persentase capaian 100,73 %.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.184.582.736,40 (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 7.721.855.354,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 94,35 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,38%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Asahan


Ali Muchhori, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197308062002121004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN KABUPATEN ASAHAN**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	81.409,11 TON
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B = 65

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.777.074.175,00	APBD
2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	765.084.825,00	APBD
3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	275.000.050,00	APBD
4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	55.688.900,00	APBD



BUPATI ASAHAN

SURYA, B.Sc

Kisaran, 30 Januari 2025
**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Asahan**


ALI MUQHOFAR, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730806 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	116,14 %

TABEL REALISASI KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
						ANGGARAN	%	
Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	115,80	116,64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.933.455.068,40	3.535.534.235,00	89,88
				1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	47.130.200,00	45.986.100,00	97,57
				1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>17.511.850,00</i>	<i>17.310.650,00</i>	98,85
				2.	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>15.118.325,00</i>	<i>14.175.425,00</i>	93,76
				3.	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>14.500.025,00</i>	<i>14.500.025,00</i>	100,00
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.152.189.406,40	2.765.038.914,00	87,72
				1.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>3.143.918.406,40</i>	<i>2.756.815.914,00</i>	87,69
				2.	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>8.271.000,00</i>	<i>8.223.000,00</i>	99,42
				3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
				1.	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>9.450.000,00</i>	<i>9.450.000,00</i>	100,00
				4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.410.645,00	240.853.440,00	99,36
				1.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>15.056.500,00</i>	<i>15.056.500,00</i>	100,00
				2.	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>40.320.575,00</i>	<i>40.309.075,00</i>	99,97
				3.	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>15.024.820,00</i>	<i>14.919.000,00</i>	99,30
				4.	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>25.560.900,00</i>	<i>25.560.900,00</i>	100,00
5.	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>15.274.200,00</i>	<i>15.274.200,00</i>	100,00				

Lampiran 3

				6.	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>16.632.000,00</i>	<i>16.125.000,00</i>	<i>96,95</i>
				7.	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	<i>34.541.650,00</i>	<i>34.541.650,00</i>	<i>100,00</i>
				8.	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>80.000.000,00</i>	<i>79.067.115,00</i>	<i>98,83</i>
				5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	113.602.100,00	113.150.000,00	99,60
				1.	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>113.602.100,00</i>	<i>113.150.000,00</i>	<i>99,60</i>
				6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.443.677,00	146.841.099,00	97,61
				1.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>53.387.677,00</i>	<i>49.785.099,00</i>	<i>93,25</i>
				2.	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>97.056.000,00</i>	<i>97.056.000,00</i>	<i>100,00</i>
				7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218.229.040,00	214.214.682,00	98,16
				1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>123.544.500,00</i>	<i>119.772.682,00</i>	<i>96,95</i>
				2.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>78.444.540,00</i>	<i>78.382.000,00</i>	<i>99,92</i>
				3.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>16.240.000,00</i>	<i>16.060.000,00</i>	<i>98,89</i>
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		650.000.000,00	647.962.333,00	99,69
				1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	650.000.000,00	647.962.333,00	99,69
				1.	<i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>650.000.000,00</i>	<i>647.962.333,00</i>	<i>99,69</i>
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		2.896.610.325,00	2.836.430.911,00	97,92

Lampiran 3

				1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.141.575.275,00	1.136.314.825,00	99,54
				1.	<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>	<i>732.054.675,00</i>	<i>730.817.975,00</i>	<i>99,83</i>
				2.	<i>Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>	<i>252.031.100,00</i>	<i>251.613.900,00</i>	<i>99,83</i>
				3.	<i>Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>44.576.425,00</i>	<i>44.575.225,00</i>	<i>100,00</i>
				4.	<i>Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>27.952.875,00</i>	<i>27.851.975,00</i>	<i>99,64</i>
				5.	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>26.171.350,00</i>	<i>23.148.700,00</i>	<i>88,45</i>
				6.	<i>Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>8.923.700,00</i>	<i>8.663.700,00</i>	<i>97,09</i>
				7.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis</i>	<i>32.168.400,00</i>	<i>31.947.800,00</i>	<i>99,31</i>
				8.	<i>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	<i>17.696.750,00</i>	<i>17.695.550,00</i>	<i>99,99</i>
				2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	351.780.000,00	329.451.650,00	93,65
				1.	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>350.690.000,00</i>	<i>328.361.650,00</i>	<i>93,63</i>
				2.	<i>Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>100,00</i>
				3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	1.403.255.050,00	1.370.664.436,00	97,68
				1.	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>1.385.223.550,00</i>	<i>1.355.632.936,00</i>	<i>97,86</i>

Lampiran 3

				2.	<i>Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun</i>	18.031.500,00	15.031.500,00	83,36
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		652.389.725,00	652.083.125,00	99,95
				1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.819.950,00	21.818.750,00	99,99
				1.	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	21.819.950,00	21.818.750,00	99,99
				2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	630.569.775,00	630.264.375,00	99,95
				1.	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	516.856.100,00	516.565.500,00	99,94
				2.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/Kota</i>	18.730.650,00	18.728.250,00	99,99
				3.	<i>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>	84.906.275,00	84.894.475,00	99,99
				4.	<i>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	10.076.750,00	10.076.150,00	99,99
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		52.127.618,00	49.844.750,00	95,62
				1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	52.127.618,00	49.844.750,00	95,62
				1.	<i>Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan san Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	32.800.168,00	31.177.300,00	95,05
				2.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	19.327.450,00	18.667.450,00	96,59
				Total		8.184.582.736,40	7.721.855.354,00	94,35

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
URAIAN	KINERJA	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan				115,80%				116,64%

PROGRAM		Kegiatan	Aksi	Satuan	Jadwal				Realisasi			
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Uraian		1	2	3	4	1	2	3	4
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 51,22 %	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit			4				4	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skore PPH Konsumsi 87,27	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	400	500	330	500	400	500	330	500
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan				1				1
			Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan				1				

Lampiran 4

			Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Unit			1				1	
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan				1				1
			Tersedianya proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen				1				1
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis					1				1
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen				1				1
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton			25				25	
			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton				25				-
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan			1					1
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan			1					1
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan 80,88 %	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen			1					1

Lampiran 4

		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1					1
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan			1					1
			Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen			1					1
			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen				1				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan keamanan Pangan 90 %	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Laporan			1					1
			Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen			1					1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	KGB x Produksi Padi (GKG)	<p>KGB = Konversi Gabah Ke Beras Sebesar 64,02 %</p> <p>PP = Produksi Padi setelah menjadi Gabah Kering Giling</p> <p>Note : Nilai Konversi Gabah ke Beras Mengikuti Angka Konversi Nasional</p>	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	<p>Jlh Ketersediaan Beras = Total stok beras yang tersedia (produksi beras pada kilang + cadangan beras pemerintah daerah)</p> <p>Kebutuhan Beras = Total kebutuhan konsumsi beras masyarakat dalam periode tertentu dalam satu wilayah kabupaten</p> <p>100 % : Pengali Persentase</p>	$\frac{\text{Jlh Ketersediaan Beras}}{\text{Kebutuhan Beras}} \times 100\%$	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan

PENGUKURAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	115,80	116,64	100,73